

**REALISASI
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2013**

Berdasarkan Keputusan DPR-RI No. 04/DPR RI/II/2012-2013 dan Keputusan DPR RI No. 01/DPR RI/I/2013-2014 terdapat 75 (tujuh puluh lima) RUU yang menjadi prioritas Prolegnas Tahun 2013.

- Keputusan DPR RI No. 04/DPR RI/II/2012-2013 tentang Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2012 menetapkan 70 (tujuh puluh) RUU sebagai prioritas Prolegnas Tahun 2013 dengan rincian, 26 (dua puluh enam) RUU Prakarsa Pemerintah dan 44 (empat puluh empat) RUU Prakarsa DPR
- Keputusan DPR RI No. 01/DPR RI/I/2013-2014 tentang penetapan 5 (lima) RUU tambahan dalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2013 dengan rincian 1 (satu) RUU Prakarsa Pemerintah dan 4 (empat) RUU Prakarsa DPR

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	REALISASI	KETERANGAN (Untuk yang belum terealisasi)
1.	RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara	Pemerintah		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi I DPR
2.	RUU tentang Aparatur Sipil Negara	DPR	Disetujui oleh Paripurna DPR pada tanggal 17 Desember 2013. Disahkan menjadi UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	
3.	RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah	Pemerintah		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi II
4.	RUU tentang Mahkamah Agung	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi III
5.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi III
6.	RUU tentang Pemberantasan Perusakan Hutan	DPR	Telah disahkan menjadi UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan	
7.	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	DPR	Telah disahkan menjadi UU No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	
8.	RUU tentang Jalan	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi V
9.	RUU tentang Perdagangan	Pemerintah		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi VI

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	REALISASI	KETERANGAN (Untuk yang belum terealisasi)
10.	RUU tentang Perindustrian	Pemerintah	Disetujui oleh Paripurna DPR pada tanggal 19 Desember 2013. Disahkan menjadi UU No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	
11.	RUU tentang Keantariksaan	Pemerintah	Telah disahkan menjadi UU No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan	
12.	RUU tentang Jaminan Produk Halal	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi VIII
13.	RUU Tentang Tenaga Kesehatan	Pemerintah		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi IX
14.	RUU tentang Pendidikan Kedokteran	DPR	Telah disahkan menjadi UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	
15.	RUU tentang Pengurusan Negara dan Daerah	Pemerintah		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi XI
16.	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem	Pemerintah		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi XI
17.	RUU tentang Usaha Perasuransian	Pemerintah		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi XI
18.	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Baleg
19.	RUU tentang Organisasi Masyarakat	DPR	Telah disahkan menjadi UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi masyarakat	
20.	RUU tentang Keamanan Nasional	Pemerintah		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus
21.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	DPR	Disetujui oleh Paripurna DPR pada tanggal 18 Desember 2013. Disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2014 tentang	
22.	RUU Tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus
23.	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus
24.	RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	REALISASI	KETERANGAN (Untuk yang belum terealisasi)
25.	RUU tentang Perjanjian Internasional	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi I
26.	RUU tentang Pemerintahan Daerah	Pemerintah		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus
27.	RUU tentang Desa	Pemerintah	Disetujui oleh Paripurna DPR pada tanggal 18 Desember 2013. Disahkan menjadi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa	
28.	RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	Pemerintah	Telah disahkan menjadi UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	
29.	RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus
30.	RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi I
31.	RUU tentang Kepalangmerahan	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus
32.	RUU tentang Keperawatan	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi IX
33.	RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji	DPR		RUU dalam tahap harmonisasi di Baleg
34.	RUU Tentang Pertanahan	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi II
35.	RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi IV
36.	RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi	DPR		RUU dalam Tahap harmonisasi di Baleg
37.	RUU Tentang Pencarian Dan Pertolongan	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi V)
38.	RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi VI)
39.	RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22	DPR		RUU dalam Tahap harmonisasi di

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	REALISASI	KETERANGAN (Untuk yang belum terealisasi)
	Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi			Baleg
40.	RUU Tentang Kesetaraan Gender	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi VIII)
41.	RUU Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR		RUU dalam Tahap harmonisasi di Baleg
42.	RUU Tentang Kesehatan Jiwa	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi IX
43.	RUU Tentang Kebudayaan	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi X)
44.	RUU Tentang Sistem Perbukuan Nasional	DPR		RUU dalam Tahap harmonisasi di Baleg
45.	RUU Tentang Kawasan Pariwisata Khusus	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi X)
46.	RUU Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi XI)
47.	RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPR		Menunggu Surpes
48.	RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden	DPR		RUU dan NA disiapkan oleh Baleg
49.	RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus
50.	RUU Tentang Keinsinyuran	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus
51.	RUU Tentang Advokat	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus
52.	RUU Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat	DPR		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus
53.	RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji	Pemerintah		RUU dalam tahap Pembahasan Internal antara Kementerian Agama

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	REALISASI	KETERANGAN (Untuk yang belum terealisasi)
				dengan Kementerian Keuangan
54.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pemerintah		RUU dalam Tahap Pembicaraan Tk.I Di Komisi III
55.	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pemerintah		Sudah disampaikan kepada Presiden melalui surat Menteri Hukum dan HAM tanggal 5 Agustus
56.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Pemerintah		RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi III
57.	RUU tentang Administrasi Pemerintahan	Pemerintah		RUU dalam Tahap Permintaan Paraf Menteri terkait
58.	RUU tentang Rahasia Negara	Pemerintah		RUU dalam Tahap Permintaan Paraf Menteri terkait
59.	RUU tentang Pertembakauan	DPR		Internal Pemrakarsa (Baleg)
60.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi III)
61.	RUU tentang Konservasi Tanah dan Air	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi IV)
62.	RUU tentang Kelautan	DPR		Internal Pemrakarsa (DPD)
63.	RUU tentang Pengaturan Minuman Beralkohol	DPR		Internal Pemrakarsa (Baleg)
64.	RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	Pemerintah		Internal Pemrakarsa (Kementerian Keuangan)
65.	RUU tentang Panas Bumi	Pemerintah		RUU sudah disampaikan kepada DPR
66.	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Pemerintah		RUU sudah disampaikan kepada DPR
67.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Pemerintah	Telah disahkan menjadi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	
68.	RUU tentang Perubahan Harga Rupiah	Pemerintah		RUU sudah disampaikan kepada DPR
69.	RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Pemerintah		RUU sudah disampaikan kepada DPR

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	REALISASI	KETERANGAN (Untuk yang belum terealisasi)
70.	RUU Perubahan atas UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Pemerintah		RUU dalam Tahap Permintaan Paraf Menteri terkait
RUU PRIORITAS TAMBAHAN TAHUN 2013				
71.	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi I)
72.	RUU tentang Hukum Disiplin Militer	DPR		RUU dalam Tahap harmonisasi di Baleg
73.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	DPR		Internal Pemrakarsa (Baleg)
74.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR		Internal Pemrakarsa (Baleg)
75.	RUU tentang Perubahan atas UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	Pemerintah		Sudah disampaikan ke DPR

DAFTAR KUMULATIF TERBUKA		
1.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan Rotterdam Convention On The Prior Informed Consent Procedure For Certain Hazardous Chemicals And Pesticides In International Trade (Konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia Dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan Internasional) UU No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari

		Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)
2.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 2. UU No. 22 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 3. UU No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
3.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur 2. UU No. 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka Di Provinsi Nusa Tenggara Timur 3. UU No. 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Di Provinsi Sulawesi Barat 4. UU No. 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Di Provinsi Sulawesi Tengah 5. UU No. 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu Di Provinsi Maluku Utara 6. UU No. 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan 7. UU No. 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Di Provinsi Sulawesi Tenggara 8. UU No. 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah 9. UU No. 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Tenggara 10. UU No. 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau Di Provinsi Papua Barat 11. UU No. 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas

		Utara Di Provinsi Sumatera Selatan
4.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang	
5.	RUU Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi	